

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA
KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : FADILA NURHALIZA
N P M : 1805170338
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(Pandapotan Ritonga, SE., M.Si)

Penguji II

(Muhammad Irsan, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(Dr. Eka Nurmal Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

PANITIA UJIAN

Un Cerdas | Terpercaya

(H. IANURI, S.E., A.M., M.Si.)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA LENGKAP : FADILA NURHALIZA
NPM : 1805170338
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juli 2022

Pembimbing Skripsi

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)



(H. Januri, S.E., M.M., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Tujuan penelitian diperbaharui lagi	2/7 22	
Bab 2	- Gambar kerangka berpikir diperbaiki - Perbaikan penelitian terdahulu	2/7 22	
Bab 3	Jadwal penelitian diperbaharui	2/7 22	
Bab 4	- Deskriptif data buat diagram / gambar - Pembahasan masalah	2/7 22	
Bab 5	kesimpulan singkat saja, saran harus menjawab temuan peneliti / masalah	2/7 22	
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si)

Medan, 2022

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	perbaiki deskripsi data, perbaiki luas kelas rinci cap, masalah luas wawancara.	18/7/22	3/
Bab 5	himpun luas singkat dgn sesuai lembang peneliti saran luas sesuai tema peneliti	18/7/22	3/
Daftar Pustaka	Siukel pak merdeluy, sita dosen alat UMSU.	18/7/22	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si)

Medan, 2022

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



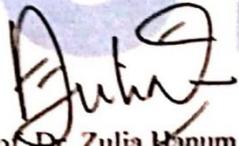
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

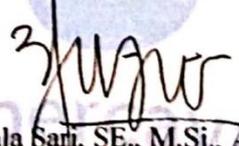
Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Rab 1	—		
Rab 2	—		
Rab 3	—		
Rab 4	—		
Rab 5	kesimpulan di buat singkat dan sangat lebih ringan ya kawan, dan sangat luas opsional	22/7/22	3/1
Daftar Pustaka	Soal dosen Akuntansi UMSU		3/1
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si)

Medan, 2022

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



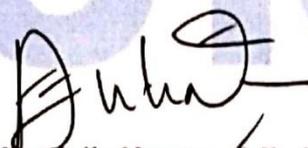
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

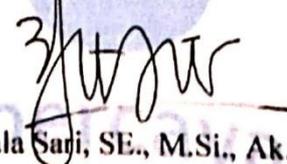
Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	—		
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACE Swapsi Campa ke sidang	25/7/22	2/7

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Medan, 2022

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : FADILA NURHALIZA
NPM : 1805170338
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat “Penetapan Proyek Proposal /Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing “ dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan 10 Agustus..... 2022
Pembuat Pernyataan



NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

Fadila Nurhaliza
Program Studi Akuntansi
Email : fadilnurhalizaa17@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan dilihat dari Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Analisis Efektivitas PAD, Analisis Efisiensi Keuangan Daerah, Analisis Keserasian, Analisis Pertumbuhan dan Analisis Kemandirian Keuangan Daerah yang bermanfaat dalam mengetahui keseimbangan antar anggaran terhadap total anggaran pendapatan pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara serta mengetahui keseimbangan antar anggaran yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dana nya pada anggaran secara optimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Sekretariat DPRD PROVSU Tahun 2017-2021. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder dan data primer.

Hasil penelitian kinerja keuangan pada Kantor Sekretariat DPRD PROVSU Tahun 2017-2021 dilihat dari Analisis Efektivitas PAD menurun karena belum mampu memanfaatkan anggaran yang direncanakan dengan baik, dari Analisis Efisiensi menunjukkan realisasi tidak pernah melebihi anggaran setiap tahunnya, dari Analisis Keserasian menunjukkan porsi belanja daerah tidak sesuai dengan yang ditentukan, dari Analisis Pertumbuhan menunjukkan menurunnya anggaran dan dari Analisis Kemandirian menunjukkan sangat efisien dalam mengelola keuangannya.

Kata Kunci : Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE REPORT OF BUDGET REALIZATION (LRA) IN ASSESSING FINANCIAL PERFORMANCE AT THE SECRETARIAT OFFICE OF THE DPRD PROVINCE OF NORTH SUMATERA

Fadila Nurhaliza
Accounting Study Program
Email : fadilnurhalizaa17@gmail.com

This study aims to find out how financial performance is seen from Regional Financial Ratio Analysis, namely PAD Effectiveness Analysis, Regional Financial Efficiency Analysis, Harmony Analysis, Growth Analysis and Regional Financial Independence Analysis which are useful in knowing the balance between budgets and total budget revenues at the Provincial DPRD Secretariat Office. North Sumatra as well as knowing the balance between budgets that illustrates how local governments prioritize their funds in the budget optimally.

The research method used is descriptive method with quantitative data type in the form of Budget Realization Report (LRA) PROVSU DPRD Secretariat Office 2017-2021. Sources of research data using secondary data and primary data.

The results of the research on financial performance at the PROVSU DPRD Secretariat Office in 2017-2021 seen from the Effectiveness Analysis of PAD decreased because it was not able to utilize the planned budget properly, from the Efficiency Analysis it showed that realization never exceeded the budget every year, from the Harmony Analysis showed the portion of regional spending did not match As determined, the Growth Analysis shows a decline in the budget and from the Independence Analysis shows it is very efficient in managing its finances.

Keywords : Regional Financial Ratios, Financial Performance, Budget Realization Report

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan hidayah-Nya untuk memampukan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA“ guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar **Sarjana** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaiannya skripsi ini, mahasiswa mendapatkan banyak dukungan secara mental dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk yang teristimewa untuk lelaki kekasih hatiku Ayahanda Ali Yusyak, selaku Papa tercinta. Dan yang tersayang Ibunda Nurbaini, selaku Mama tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan do'a yang diberikan selama ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri S.E, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Sukma Lesmana, S.E., M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu mengarahkan penulis hingga ke titik ini.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA selaku dosen Pembimbing penulis yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
8. Ibu Efi Julianti, S.Kom, M.Si selaku Kabag Program dan Keuangan Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
9. Bapak Hasanuddin Ambarita selaku Bendahara Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
10. Bapak Muhammad Syafii selaku Staff Tata Usaha Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.
11. Seluruh Dosen Pengajar dan Staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Teristimewa kepada keluarga penulis, adik kandung saya Winda Aprilia Nuraliza dan seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan segalanya kepada penulis, dari kasih sayang, perhatian, dukungan, pengorbanan serta dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Akuntansi S-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta do'a yang tiada hentinya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.

13. Sahabat Seperjuangan DAD 2018 penulis di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
14. Sahabat Seperjuangan UKM Tapak Suci 2018 penulis di Tapak Suci Putera Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
15. Sahabat Seperjuangan penulis yang termasuk dalam Keluarga Rombongan Anak Sholeh (David, Dedi, Desy, Hasan, Pia, Putra) untuk semangat dan senantiasa kebersamai perjuangan dalam penulisan skripsi ini.
16. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang telah banyak memberikan bantuan dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan hati yang terbuka serta pemikiran idealis yang penulis terima guna menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak.

Akhir kata dengan segala motivasi dan kerendahan hati yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya, penulis tidak dapat membalasnya kecuali dengan do'a dan syukur kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, penulis menyadari bahwa tugas skripsi ini masih jauh dari kata sempurna meskipun penulisan ini dilakukan dengan semaksimal mungkin, tentu masih banyak kekurangan baik dari isi maupun bahasa, karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis, penulis berharap skripsi ini dapat berguna serta bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri dan penulis berharap skripsi ini akan menjadi salah satu dokumen penting untuk perkembangan

dunia kerja di masa-masa yang akan datang. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan terima kasih. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa Allah Ridho. Aamiin ya Mujibassailin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Medan, Juli 2022.

Hormat Penulis,

FADILA NURHALIZA

1805170338

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Penelitian Terdahulu.....	35
2.3 Kerangka Berfikir.....	37
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Pendekatan Penelitian.....	39
3.2 Definisi Operasional Variabel	39
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	42
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV	47
HASIL DAN PEMBAHASAN	47

4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.2 Pembahasan	62
BAB V	73
KESIMPULAN DAN SARAN.....	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75

DAFTAR TABEL

1.1 Data Pendapatan Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD PROVSU.....	3
2.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	32
2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	35
2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
3.1 Waktu Penelitian.....	41
3.2 Kisi-Kisi Wawancara	43
4.1 Data Pendapatan Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD PROVSU.....	48
4.2 Analisis Efektivitas PAD Anggaran dan Realisasi Tahun 2017-2021	51
4.3 Analisis Efisiensi Keuangan Daerah Tahun 2017-2021	53
4.4 Analisis Kekeragaman Keuangan Daerah Tahun 2017-2021	55
4.5 Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah Tahun 2017-2021	58
4.6 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Tahun 2017-2021	61

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir	38
4.1 Grafik Laporan Realisasi Anggaran DPRD PROVSU Tahun 2017-2021	49
4.2 Grafik Perkembangan Analisis Efektivitas PAD.....	51
4.3 Grafik Perkembangan Analisis Efisiensi Keuangan Daerah.....	53
4.4 Grafik Perkembangan Analisis Keserasian	56
4.5 Grafik Perkembangan Analisis Pertumbuhan	59
4.6 Grafik Perkembangan Analisis Kemandirian.....	61
4.7 Grafik Perkembangan Analisis Rasio Keuangan Daerah	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dikeluarkannya peraturan tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka kekuasaan atau tanggungjawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya secara maksimal menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi (Abdullah et al., 2006). Suatu anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dan menyatakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu (Mardiasmo, 2002). Dengan anggaran manajemen dapat menentukan efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkan antara anggaran dengan hasil akrual (realisasi terkini) yang dicapai (Radita, 2017). Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi pemerintah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengelolaan instansi tersebut dalam mencapai hasil yang maksimal. (E. N. Sari & dkk, 2016) Penyusunan anggaran yang baik sebagai sistem perencanaan koordinasi dan pengendalian dalam instansi tersebut (Alfi, 2018). Oleh karena itu suatu instansi pemerintah dituntut mempunyai pimpinan yang dapat bekerja dengan efektif dan efisien,

maka perlu adanya alat bantu untuk melaksanakannya, salah satu alat tersebut adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (Niaman, 2017).

Menurut (Mardiasmo, 2009:63) anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberikan informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan (Mahsun, 2006).

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik atau tidaknya, karena penilaian kinerja yang ada pada pemerintahan tidaklah sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan-perusahaan yang memperoleh laba dalam pelaksanaan teknisnya (Widyaningsih, 2006).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disampaikan oleh TAPD menurut (Peraturan Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, 2011) Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara garis besar meliputi Penyusunan KUA-PPAS; Penyusunan Raperda APBD dan Penetapan APBD dalam tahap penyusunan Raperda APBD disusun RKA-SKPD yang didalamnya termuat Penyusunan Rincian Anggaran Pendapatan dalam RKA SKPD

1. Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dalam RKA SKPD
- 2.1. Penyusunan Rincian Anggaran Belanja Langsung (Program & Kegiatan) dalam RKA SKPD
- 2.2.1. Penyusunan Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam RKA SKPD
- 3.2. Rencana Kerja Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang termuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing

program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, di rinci sampai dengan obyek pendapatan, belanja pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

Anggaran digunakan sebagai alat untuk merancang program kerja atau langkah-langkah yang akan dilakukan agar setiap aktivitas dapat terarah dan terkontrol dengan baik (Junita & dkk, 2016).

Hasil kinerja seseorang dapat dinilai berdasarkan pencapaian atas realisasi anggaran. Keadaan ini bias mengakibatkan pelaksanaan belanja akan mengalami hambatan. Unit-unit kerja pemerintah diharapkan dapat menghasilkan sejumlah biaya unit yang spesifik untuk unit kerjanya.

Tabel 1.1
Data Pendapatan
Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Anggaran	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)	Realisasi	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)
1	2017	12.417.425.444.814	17%	12.234.837.881.539	16,80%
2	2018	13.037.539.478.554	4,99%	12.703.058.587.891	3,83%
3	2019	14.034.339.344.970	7,65%	13.081.482.296.509	2,98%
4	2020	13.332.622.377.012	-5%	12.427.408.181.012	-5%
5	2021	12.665.991.258.012	-5%	11.806.037.771.012	-5%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa perencanaan atas anggaran pada tahun 2017 s/d 2021 telah disetujui, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 realisasi anggaran belum pernah mencapai anggaran yang direncanakan dan pada tahun 2019 realisasi anggaran jauh dari anggaran yang direncanakan. Pada realisasi dan anggaran pendapatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami tren kenaikan dan penurunan, pada realisasi dan anggaran pendapatan tahun 2020 dan 2021 mengalami tren penurunan.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasi memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak efektif dalam pengambilan keputusan penganggaran dan pembiayaan tata laksana kegiatan instansi selama satu tahun anggaran tersebut (Juliandi & dkk, 2015). Dengan alat ukur berupa analisis yang ada didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran pendapatan (F, 2021). Untuk mengetahui secara besarnya varians anggaran pendapatan dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal atau persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pendapatan yang disajikan terlihat sejauh mana keefektifan dan penerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran tersebut.

Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui seberapa jauh pemenuhan pada anggaran kegiatan yang digunakan oleh instansi (Halim, 2013). Misalnya dengan melihat pertumbuhan pada masing-masing anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional atau efektif dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Pengukuran kinerjanya dapat menggunakan analisis pertumbuhan anggaran pendapatan seperti Analisis Rasio Keuangan Daerah.

Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah yang bermanfaat dalam mengetahui keseimbangan antar anggaran pendapatan. Salah satu nya adalah dengan menilai Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio

Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap total anggaran pendapatan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar anggaran pendapatan yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dana nya pada anggaran pendapatan secara optimal. Analisis ini dapat diketahui porsi anggaran pendapatan daerah yang dialokasikan untuk anggaran pendapatan pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU).

Untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah berupa angka efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Pengukuran kinerja anggaran yang di fungsi kan untuk menunjukkan produktivitas anggaran.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran dari tahun 2017-2021 belum pernah mencapai anggaran yang direncanakan.
- b. Anggaran Pendapatan pada tahun 2019 yang direalisasikan jauh dari anggaran yang telah direncanakan.

- c. Realisasi dan Anggaran Pendapatan tahun 2017-2021 mengalami tren kenaikan dan penurunan.
- d. Realisasi dan Anggaran Pendapatan tahun 2020 dan 2021 mengalami tren penurunan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah penulis hanya menekankan pada permasalahan mengenai penilaian kinerja keuangan pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) selama kurun waktu 5 tahun yang dapat dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu Anggaran dan Realisasi Pendapatan tahun 2017-2021 dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari analisis varians anggaran?
2. Bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari analisis pertumbuhan anggaran?
3. Bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari keserasian anggaran?
4. Bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari rasio efisiensi pendapatan?
5. Bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari rasio efektivitas pendapatan?

6. Bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari rasio kemandirian pendapatan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari analisis varians anggaran.
- b. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari analisis pertumbuhan anggaran.
- c. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari keserasian anggaran.
- d. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari rasio efisiensi pendapatan.
- e. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari rasio efektivitas pendapatan.
- f. Mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kinerja anggaran pendapatan dilihat dari rasio kemandirian pendapatan.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk menambah dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU).

b. Bagi Kantor Sekretariat DPRD PROVSU

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan referensi dalam menganalisis kinerja anggaran pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penulis selanjutnya, terkhususnya mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Tahun anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom, karena mempunyai sasaran dan tahapan-tahapan yang ke semua nya memiliki tahapan pertanggungjawaban. Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusunan anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan perencanaan awal dalam realisasi yang memfasilitasi tercapainya kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja yang akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut (Indra Bastian, 2010:19) berdasarkan *National Committee Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, definisi anggaran adalah

“Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.” Pengertian anggaran menurut (Sri Rahayu & Andry Arifian Rachman, 2013:4) anggaran adalah “Anggaran merupakan alat perencanaan dan pengendalian.”

Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, sedangkan pengendalian adalah melihat ke belakang, memutuskan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat. Uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat tersebut.

Anggaran dianggap sistem yang otonom karena mempunyai sasaran dan tahapan-tahapan yang ke semua nya memiliki tahapan pertanggungjawaban. Anggaran adalah rencana manajemen dengan anggapan bahwa penyusun anggaran akan mengambil langkah-langkah positif untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena merupakan perencanaan awal dalam realisasi (*plan for action*) yang memfasilitasi tercapainya kegiatan pemerintahan yang apabila dalam anggaran tersebut tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut (Mardiasmo, 2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Proses penyusunan anggaran sektor

publik pada umumnya disesuaikan dengan Peraturan Lembaga yang lebih tinggi yang didasarkan pada (*Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, 2004*) sehingga lahir lah tiga paket Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat.

Kemudian keluar peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (saat ini telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan menggantikan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002.

Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu proses dalam meningkatkan manfaat sumber daya input untuk pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) melalui *Key Performance Indicators* (KPI) yang terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu pengukuran kinerja, pengukuran biaya untuk menghasilkan penggunaan informasi kinerja *outcome* dan *output* serta penilaian keefektifan dan efisiensi anggaran dengan berbagai alat analisis. Dengan tujuan alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik (*Peraturan Pemerintah No. 55, 2005*).

Berikut dapat dijadikan bahan penilaian pada kinerja anggaran.

Menurut (Mulyadi, 2001) ada beberapa karakteristik anggaran antara lain :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan keuangan lainnya.
2. Umum nya mencakup jangka waktu 1 tahun.
3. Berisi komitmen atau kesanggupan manajemen yang berarti bahwa manajer setuju untuk menerima tanggungjawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan anggaran.
4. Usulan anggaran di *review* dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran.
5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.
6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya di analisis dan dijelaskan.

Dari karakteristik diatas dapat diketahui bahwa anggaran menjadi alat yang penting bagi manajemen dalam melaksanakan tugas nya. Sebagai alat untuk membantu pencapaian tujuan, anggaran dapat diandalkan karena dibuat berdasarkan analisa data-data tahun yang lalu dan proyeksi tahun yang akan datang.

Karakteristik anggaran yang baik menurut (Mariani, 2006) :

1. Anggaran disusun berdasarkan program.
2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Pembelajaran Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja atau *outcome* dari pengalokasian biaya yang didasarkan pada kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan. Dalam implementasi nya, anggaran

berbasis kinerja juga menekankan pada penggunaan dana yang dialokasikan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dengan kata lain anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang mengkaitkan alokasi anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan kegiatan atau program kerja dengan hasil kerja.

Dengan demikian struktur anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan dan pembiayaan yang di rinci menurut kegiatan atau program kerja yang akan dilaksanakan setiap unit kerja dan jenis anggaran. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sedangkan pembiayaan adalah transaksi keuangan dalam bentuk pengeluaran pendapatan untuk kegiatan anggaran.

Pengembangan indikator keberhasilan (Nordiawan, 2016) menggunakan kriteria :

1. Relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran unit kerja, program atau kegiatan.
2. Mudah dipahami, dapat di komunikasikan dengan jelas.
3. Konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan, penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan.
4. Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja dari program atau kegiatan yang sejenis.
5. Andal (*reliable*) diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat di verifikasi.

Beberapa hambatan dapat diketahui dengan :

1. Realisasi penyerapan anggaran termasuk anggaran yang dipengaruhi oleh bagaimana pola perencanaan dan penganggaran di daerah, mekanisme transfer dan pelaksanaan program/kegiatan di daerah.

2. Dalam proses perencanaan anggaran di daerah, permasalahan yang sering dihadapi adalah adanya perbedaan program-program prioritas antara pihak eksekutif dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD antara pemerintah daerah dengan legislatif.
3. Realisasi anggaran di daerah pada akhir tahun anggaran seringkali masih di bawah target atau lebih rendah dibandingkan dengan anggarannya.

Hal ini ditengarai karena beberapa hal yaitu (*PPAS Perubahan APBD, 2019*) :

- a) Terkadang peraturan daerah mempunyai kecenderungan untuk melakukan perubahan APBD sekitar bulan Agustus-September tahun anggaran berjalan, setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- b) Adanya pelampauan pendapatan, besarnya angka SiLPA dan penetapan perubahan APBD menjelang akhir tahun anggaran berjalan mengakibatkan waktu yang tersisa untuk menyesuaikan anggaran dan merealisasikannya terbatas sehingga menyebabkan rendahnya penyerapan dan rendahnya kualitas penyelesaian kegiatan.

Dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa anggaran merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

2.2.2.2 Fungsi Anggaran

Bagi organisasi sektor publik seperti instansi pemerintah. Anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Mardiasmo, 2009) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut :

1. Alat Perencanaan (*Planning Tool*)
2. Alat Pengendalian (*Control Tool*)
3. Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)
4. Alat Politik (*Political Tool*)
5. Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordinatin and Communication Tool*)
6. Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)
7. Alat Motivasi (*Motivation Tool*)
8. Alat Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Anggaran sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang dibuat.

- 2) Anggaran sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*Overspending*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*Mis Spending*).

3) Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Anggaran sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Dalam organisasi sektor publik dan melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

5) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordinatin and Communication Tool*)

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.

6) Anggaran sebagai Alat Penilaian Kerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran adalah suatu ukuran yang biasa menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

7) Anggaran sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat motivasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

8) Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.2.2.3 Proses Penyusunan Anggaran

Untuk menyusun suatu anggaran atau rencana laba, terdapat langkah-langkah tertentu yang perlu diambil, yaitu :

- a. Manajemen puncak harus memutuskan apa yang menjadi tujuan jangka pendek perusahaan dan strategi mana yang akan digunakan untuk mencapainya.
- b. Tujuan harus ditetapkan dan sumber daya dialokasikan.
- c. Suatu anggaran yang komprehensif harus disusun, kemudian disetujui oleh manajemen puncak. Setelah disetujui, anggaran harus dikomunikasikan kepada penyelia dan karyawan yang kinerjanya dikendalikan.
- d. Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja aktual dengan tujuan yang telah dianggarkan secara periodik.

2.1.2 Realisasi

2.1.2.1 Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut (Prasetya, 2005) dalam bukunya yang berjudul *“Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”* menjelaskan: *“Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.”*

2.1.2.2 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintahan pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran atau realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan

keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan jabatan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Unsur-unsur yang mencakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat dan Daerah (KSAP) yang mencakup komite yang dibentuk oleh Departemen Keuangan RI yaitu untuk memecahkan berbagai kebutuhan yang muncul dalam (*Pelaporan Keuangan, Akuntansi Dan Audit Di Pemerintahan, 2009*) terdiri dari :

1. Pendapatan (Basis Kas) adalah hak penerimaan oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Pendapatan (Basis Akrua) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.
3. Belanja (Basis Kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendaharawan Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali ke pemerintah.
4. Belanja (Basis Akrua) adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
5. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

6. Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang berada dalam penganggaran. Pemerintahan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
7. Penerimaan pembayaran antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran penerimaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2.1.2.3 Periode Ketepatan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain itu, Laporan Realisasi Anggaran ini juga disajikan 2 kali setahun, yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahunan disajikan dengan satu periode yang berubah lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut :

- a) Anggaran alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun.
- b) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.1.2.4 Ketepatan Waktu Pelaporan

Ketepatan waktu merupakan hal yang harus diperhatikan sekali dalam pelaporan keuangan karena dapat mengefisiensi waktu pengambilan keputusan berdasarkan hasil pelaporan keuangan, semesteran atau laporan keuangan tahunan.

2.1.2.5 Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (M. Sari, 2021).

Disamping hal di atas, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan indikasi tentang perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2.1.3 Analisis Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Analisis Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya); Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dan sebagainya; Penjabaran sesudah dikaji

sebaik-baiknya; Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Usulan anggaran pada umumnya telah terlebih dahulu di telaah oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijadikan anggaran formal. Penyusunan anggaran pada organisasi sektor publik dapat membantu mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, masyarakat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan atau pengendalian (Mahsun, 2012).

Menurut (Mahsun, 2006), Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program pengukuran kinerja ditekankan pada input yaitu jika terjadinya *Overspending* dan *Under Spending*. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintahan daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat

pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment systems*.

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.3.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

- a. Untuk mengkomunikasikan strategi dengan lebih baik (*top down and bottom up*).
- b. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
- c. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan manajer bawah serta memotivasi dan untuk mencapai *goal congruence*.
- d. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

2.1.3.4 Manfaat Pengukuran Kinerja Sektor Publik

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- c. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- f. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi.
- g. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- h. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.3.5 Peran Indikator Kinerja dalam Pengukuran Kinerja Sektor

Publik

Untuk melakukan pengukuran kinerja, variabel kunci yang sudah teridentifikasi tersebut kemudian dikembangkan menjadi indikator kinerja untuk unit kerja yang bersangkutan. Untuk dapat diketahui tingkat pencapaian kinerja, indikator kinerja tersebut kemudian dibandingkan dengan target kinerja atau standar kinerja. Tahap terakhir adalah evaluasi kinerja yang hasilnya berupa *feedback*, *reward* dan *punishment* kepada manajer pusat pertanggungjawaban.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja tersebut dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama organisasi (*Critical Succes Factors*) atau bisa juga dikenal dengan CSF dan indikator kinerja kunci (*Key Performance Indicator*) atau bisa juga disebut dengan KPI.

Faktor Keberhasilan Kunci (CSF) adalah suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan kinerja unit kerja organisasi. Area ini merefleksikan preferensi manajerial dengan memperhatikan variabel-variabel kunci finansial dan non-finansial pada kondisi waktu tertentu. *Critical Succes Factor* tersebut harus secara konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam organisasi.

Indikator Kinerja Kunci / KPI merupakan sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun non-finansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi dan memonitor pencapaian kinerja.

2.1.4 Kinerja Keuangan

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan dalam konteks dunia usaha mengandung pengertian yang sangat luas. Pengertian kinerja keuangan menurut (Rahmayati, 2007) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana

maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Jumingan, 2006).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Irham Fahmi, 2012:2).

Menurut (Rudianto, 2013) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu. Kinerja keuangan sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi sampai dimana tingkat keberhasilan perusahaan berdasarkan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Menurut (Mulyadi, 2007:2) menguraikan pengertian kinerja keuangan ialah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.

Pendapat serupa dikemukakan oleh (Sawir, 2005:1) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan.

Menurut (Sujarweni, 2017:71) menyatakan bahwa kinerja keuangan merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil

pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama. Setiap pekerjaan yang telah selesai dilakukan perlu penilaian/pengukuran secara periodik.

Dari sejumlah pengertian kinerja keuangan diatas, dapat diambil kesimpulan sederhana bahwa kinerja keuangan merupakan pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas.

2.1.4.2 Penilaian Kinerja Keuangan

Menurut (Srimindarti, 2006:3) penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Pengukuran kinerja diaplikasikan perusahaan untuk melaksanakan perbaikan atas kegiatan operasional nya agar bisa bersaing dengan perusahaan lain.

Untuk investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melihat perusahaan tersebut untuk menanamkan modal nya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan.

Sedangkan bagi perusahaan, informasi kinerja keuangan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
3. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
4. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

2.1.4.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk diketahui karena pengukuran yang dilakukan dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu, pihak manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukuran kinerja keuangan tersebut.

Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan (Munawir, 2004) yakni untuk :

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban

keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil.

Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

Dengan tujuan tersebut, penilaian kinerja keuangan mempunyai beberapa peranan bagi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dapat mengukur tingkat biaya dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan, untuk menentukan atau mengukur efisiensi setiap bagian, proses atau produksi serta untuk menentukan derajat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, untuk menilai dan mengukur hasil kerja pada tiap-tiap bagian individu yang telah diberikan wewenang dan tanggungjawab serta untuk menentukan perlu tidaknya digunakan kebijaksanaan atau prosedur yang baru untuk mencapai hasil yang lebih baik (Munawir, 2002; Wild & Halsey, 2005).

2.1.5 Kinerja

2.1.5.1 Pengertian Kinerja

Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut (Halim, 2004) “Kinerja Keuangan Daerah adalah : “Merupakan salah satu

ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.”

Menurut (Bastian, 2006b) “Kinerja adalah : “Gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.”

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah, maka perlu indikator-indikator nya sebagai berikut :

- i. Sistem perencanaan dan pengendalian.
- ii. Spesifikasi teknis standarisasi.
- iii. Kompetensi teknis dan profesionalisme.
- iv. Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar.
- v. Mekanisme sumber daya manusia.

Sedangkan peran indikator kinerja bagi pemerintah antara lain :

- i. Untuk membantu memperjelas tujuan organisasi.
- ii. Untuk mengevaluasi target akhir (*final outcome*) yang dihasilkan.
- iii. Sebagai masukan untuk menentukan skema insentif manajerial.
- iv. Memungkinkan pemakai jasa layanan pemerintah untuk melakukan pilihan.
- v. Untuk menunjukkan standar kinerja.
- vi. Untuk menunjukkan efektivitas.
- vii. Untuk membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran, dan

- viii. Untuk menunjukkan wilayah, bagian atau proses yang masih potensial untuk dilakukan penghematan biaya.

2.1.5.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pokok pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai tujuan organisasi dan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, tujuan pengukuran kinerja adalah :

- i. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
- ii. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara tertimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strateginya.
- iii. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Pada dasarnya pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan yaitu :

- i. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
- ii. Untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- iii. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

2.1.5.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai manfaat yang banyak bagi organisasi, secara umum manfaat pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- i. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan menilai kinerja manajemen.
- ii. Menunjukkan arah pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

- iii. Memonitor dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan skema kerja dan pelaksanaannya.
- iv. Membantu mengungkap dan memecahkan masalah yang ada.
- v. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
- vi. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.5.4 Pengukuran Kinerja Keuangan

Analisis Efektivitas PAD

- **Rumus Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Munawir, 2004). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Kriteria Rasio Efektivitas menurut (Mahsun, 2012) adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

- **Rumus Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan

dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Efisiensi Kinerja Keuangan	Kriteria Efisiensi
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang 60%	Sangat Efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan 1997

Analisis Keserasian

- **Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana nya pada belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana

dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Kesenjangan, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Analisis Pertumbuhan

- **Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010, 2016). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD dan Belanja Modal yang diikuti maka semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD dan Belanja Operasi yang diikuti maka semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

Analisis Kemandirian

- **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) (Welsch & dkk, 2012) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern) (Sinambela & F.S, 2018). Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam

melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Oppier (2013)

- 1) Pola Hubungan Instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- 2) Pola Hubungan Konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola Hubungan Delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sebelumnya telah dilakukan sehubungan topik penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Roland Gerald Tooy, David Paul Elia Saerang, Lidia Mawikere (2016) Judul Berkala Ilmiah Efisiensi	ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN (BAPPELITBANG) KABUPATEN MINAHASA UTARA	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam laporan realisasi anggaran dapat dilihat dari tingkat perhitungan efisiensi Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dengan menggunakan rumus, yaitu rasio perbandingan dan diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian, maka tingkat efisiensi Laporan Realisasi Anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2011-2015 kurang efisien dalam penggunaan Laporan Realisasi Anggaran.
2	Astria Nur Jannah Dien, Jantje Tinangon, Stanley Walandouw (2015) ISSN 2303-1174	ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung mampu memobilisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektivitas diatas 100%.

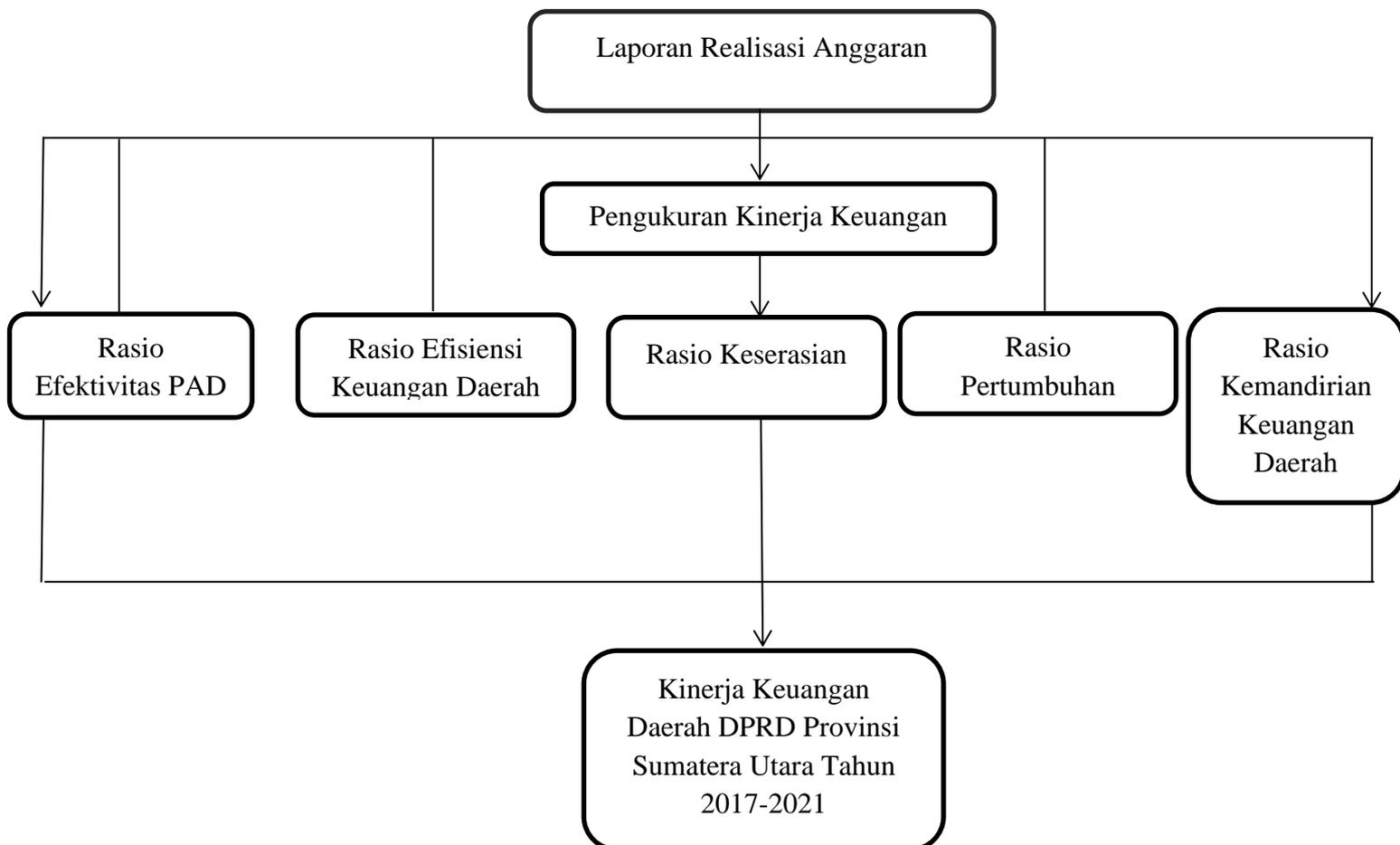
No	Peneliti/Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	D. Kartika, AB Setiawan, IC. Kusuma (2016) Jurnal Sosial Humaniora	ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO DAN EFEKTIVITAS PAD PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUKABUMI	<ul style="list-style-type: none"> • Kemandirian keuangan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2009 sampai 2013 tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif.
4	Ramlah Basri (2013) ISSN 2303-1174	ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA BPM-PD PROVINSI SULAWESI UTARA	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 baik dari proses maupun jadwal atau waktu penyusunan anggaran.
5	Rukayah Nurgrahini Kusumawati, Raden Irna Afriani (2017) Jurnal Akuntansi	ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PADA KANTOR BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SERANG	<ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efektivitasnya termasuk dalam kriteria sangat efektif.

2.3 Kerangka Berfikir

Laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan dari sebuah entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Penulis menggunakan data pada Laporan Realisasi Anggaran

(LRA) Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk mengukur tingkat kinerja keuangan dilihat dari Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan kerangka pemikiran pada penelitian ini akan disajikan gambaran kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah bisnis. Jenis pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu fenomena yang terjadi dalam keadaan nyata pada waktu penelitian dilakukan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *Deskriptif* yang merupakan suatu metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisa agar memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasional nya adalah Kinerja dapat diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Menurut (Bastian, 2006a) “Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.”

Analisis Kinerja Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan konsep Analisis Rasio Keuangan Daerah merupakan pengukuran kinerja keuangan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa efisien dan efektif kinerja dari satuan kerja perangkat daerah tersebut pada setiap periode.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Penilaian Kinerja Keuangan. Definisi variabel dari penelitian tersebut adalah :

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

- Penilaian kinerja keuangan yaitu penentuan efektivitas operasional, organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data Kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini data kuantitatif nya berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah :

- a. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, baik berupa publikasi maupun data perusahaan sendiri, antara lain data mengenai sejarah ringkas, struktur organisasi, catatan dan sumber-sumber kepustakaan. Data ini berupa Laporan Realisasi Anggaran Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ditempat penelitian, guna mencari informasi sebagai data pendukung untuk penelitian. Data ini berupa hasil wawancara dengan pegawai di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Dokumentasi, yaitu jenis data yang digunakan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung ataupun langsung berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun yang dipublikasikan

yaitu bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021 yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Wawancara (Interview), yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang yaitu pada pegawai tetap Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU). Adapun kisi-kisi wawancara dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2

Kisi-Kisi Wawancara

No	Variabel	Indikator
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi PAD 2. Anggaran PAD 3. Realisasi Belanja Daerah 4. Realisasi Pendapatan Daerah
2	Penilaian Kinerja Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Efektivitas PAD 2. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 3. Rasio Keserasian 4. Rasio Pertumbuhan 5. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif, yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan serta menafsirkan data yang bentuk deskriptif nya menggunakan angka atau numerik (statistik) sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Tahapan-tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data dari objek penelitian.
2. Mencari teori yang mendukung analisis penelitian.

3. Menganalisis data yang ada yaitu Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah.
4. Menganalisis penilaian kinerja keuangan melalui Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Menarik kesimpulan dan saran.

Pengukuran Kinerja Keuangan

Analisis Efektivitas PAD

- **Rumus Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2010b). Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

- **Rumus Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Keserasian

- **Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dana nya pada belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Pertumbuhan

- **Rasio Pertumbuhan**

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010c). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P_0 = Total Pendapatan Daerah/PAD/Belanja Modal/Belanja Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Analisis Kemandirian

- **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan\ Transfer} \times 100\%$$

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Provinsi Sumatera Utara pertama kalinya di bentuk pada tanggal 15 April 1948 berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1948, daerah ini meliputi Keresidenan Aceh dan Tapanuli Utara. Pembentukan Provinsi Sumatera Utara di atas berdasarkan surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Sumatera Utara No. 19 Tahun 1973 tertanggal 13 Agustus yang ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari tempat penelitian adalah :

1. Membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Gubernur.
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Gubernur.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, APBD, Peraturan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
5. Memilih Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wakil Gubernur.

B. Deskriptif Data

Data yang digunakan ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) dan data primer yang di dapat dari wawancara sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini juga termasuk data atas keterangan yang terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran instansi pemerintah, sesuai dengan permasalahan dan perumusan yang telah dikemukakan.

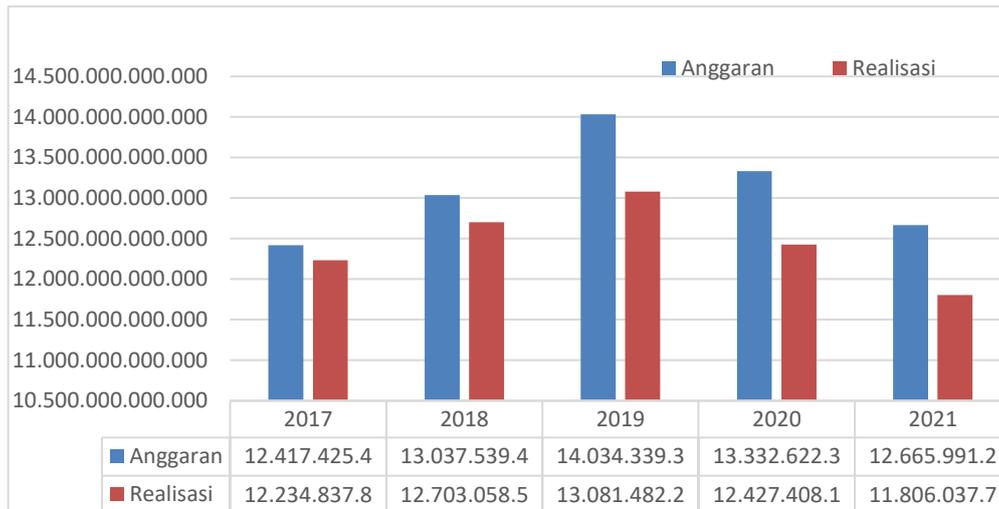
Tabel 4.1
Data Pendapatan
Pada Laporan Realisasi Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Anggaran	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)	Realisasi	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)
1	2017	12.417.425.444.814	17%	12.234.837.881.539	16,80%
2	2018	13.037.539.478.554	4,99%	12.703.058.587.891	3,83%
3	2019	14.034.339.344.970	7,65%	13.081.482.296.509	2,98%
4	2020	13.332.622.377.012	-5%	12.427.408.181.012	-5%
5	2021	12.665.991.258.012	-5%	11.806.037.771.012	-5%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel 4.1 terlihat bahwa realisasi anggaran pada tahun 2020 tidak terealisasi secara signifikan. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu pegawai tetap pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU), adapun penyebab anggaran tidak terealisasi secara signifikan adalah karena pengalihan anggaran pendapatan ke belanja barang dan jasa dan dialihkan ke hutang pemerintah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran DPRD PROVSU Tahun 2017-2021 terjadinya perbedaan setiap tahun nya, dapat dilihat perkembangan pada Grafik Laporan Realisasi Anggaran DPRD PROVSU Tahun 2017-2021 :



Gambar 4.1
Grafik Laporan Realisasi Anggaran DPRD PROVSU Tahun 2017-2021

Berdasarkan pada gambar 4.1 terlihat bahwa untuk anggaran pada tahun 2017-2019 mengalami tren kenaikan dan realisasi nya juga mengalami tren kenaikan, pada tahun 2019-2021 untuk anggaran nya mengalami tren penurunan dan juga untuk realisasi nya juga mengalami tren penurunan walaupun tidak terlalu signifikan.

Penelitian ini akan mengukur kinerja keuangan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) Tahun 2017-2011 menggunakan Analisis Rasio Keuangan Daerah yaitu Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

- **Analisis Efektivitas PAD**

Analisis Efektivitas PAD digunakan untuk menilai selisih antara total realisasi belanja yang digunakan oleh daerah dengan total realisasi pendapatan yang diterima oleh daerah agar selisih dari realisasi belanja daerah dan pendapatan daerah tersebut dapat tergambar dengan jelas. Keefektifan keuangan daerah dapat dilihat melalui

hasil perhitungan rasio efektivitas. (Sudaryono, 2017) menjelaskan bahwa “Rasio Efektivitas PAD merupakan suatu rumus yang digunakan untuk mengukur kekuatan daerah dalam mengaktualisasikan pendapatan daerah yang di agendakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah agar seberapa besar tingkat kemampuan daerah dapat tergambar dengan jelas.”

Analisis Efektivitas PAD dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{12.234.837.881.539}{12.417.425.444.814} \times 100\%$$

$$= 98\%$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{12.703.058.587.891}{13.037.539.478.554} \times 100\%$$

$$= 97\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{13.081.482.296.509}{14.034.339.344.970} \times 100\%$$

$$= 93\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{12.427.408.181.012}{13.332.622.377.012} \times 100\%$$

$$= 93\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{11.806.037.771.012}{12.665.991.258.012} \times 100\%$$

$$= 93\%$$

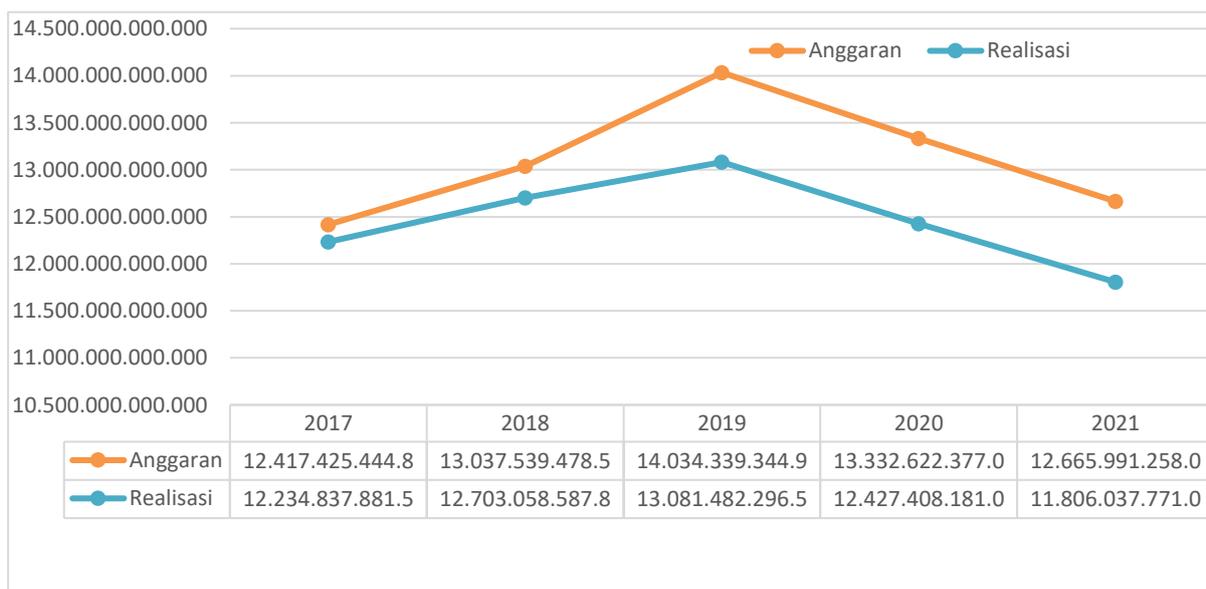
Tabel 4.2
Analisis Efektivitas PAD Anggaran dan Realisasi DPRD PROVSU Tahun 2017-2021

No	Tahun	Efektivitas PAD (%)	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)
1	2017	98%	-
2	2018	97%	4,99%
3	2019	93%	7,65%
4	2020	93%	-5%
5	2021	93%	-5%

Sumber : Data diolah (2021)

Dari data hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2019 mengalami tren penurunan dengan efektivitas PAD yang juga mengalami penurunan karena adanya pemanfaatan belanja dan pada tahun 2019-2021 mengalami tren penurunan dengan efektivitas PAD yang signifikan.

Perhitungan Analisis Efektivitas PAD dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4.2

Grafik Perkembangan Analisis Efektivitas PAD DPRD PROVSU Tahun 2017-2021

Berdasarkan pada gambar 4.2 terlihat pada grafik perkembangan Analisis Efektivitas PAD pada tahun 2017-2019 untuk anggaran nya mengalami tren kenaikan dan realisasi nya juga mengalami tren kenaikan dan pada tahun 2019-2021

untuk anggaran nya mengalami tren penurunan dan juga realisasi nya juga mengalami tren penurunan.

- **Analisis Efisiensi Keuangan Daerah**

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah digunakan untuk menghitung persentase perbandingan realisasi belanja daerah terhadap realisasi total pendapatan daerah. Efisiensi Keuangan Daerah merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara output dan input.

Analisis Efisiensi Keuangan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

$$REKD = \frac{\textit{Realisasi Belanja Daerah}}{\textit{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{8.554.970.814.539}{5.287.469.401.500} \times 100\% \\ &= 16,17\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{9.375.598.176.840}{5.638.960.579.478} \times 100\% \\ &= 16,62\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{8.899.945.553.856}{5.761.270.412.051} \times 100\% \\ &= 15,44\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{8.287.005.336.991}{5.531.237.378.774} \times 100\% \\ &= 14,98\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{7.872.655.070.141}{5.254.675.509.835} \times 100\% \\ &= 14,98\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui tingkat efisiensi keuangan daerah sebagai berikut :

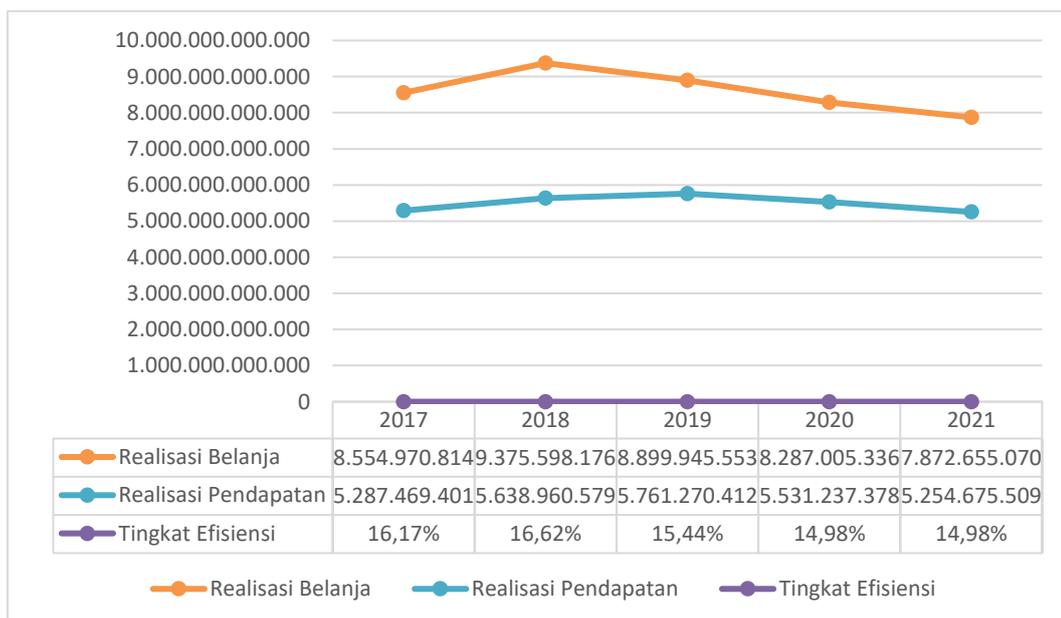
Tabel 4.3
Analisis Efisiensi Keuangan Daerah
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Tingkat Efisiensi (%)	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)
1	2017	16,17%	-
2	2018	16,62%	10%
3	2019	15,44%	-5,1%
4	2020	14,98%	-7%
5	2021	14,98%	-5%

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan perhitungan Analisis Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 tingkat efisiensi mengalami tren kenaikan, pada tahun 2019-2021 tingkat efisiensi mengalami tren penurunan.

Perhitungan Analisis Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4.3

Grafik Perkembangan Analisis Efisiensi Keuangan Daerah DPRD PROVSU Tahun 2017-2021

Berdasarkan pada gambar 4.3 terlihat grafik perkembangan Analisis Efisiensi Keuangan Daerah pada tahun 2017-2019 untuk realisasi belanja mengalami tren kenaikan dan penurunan sedangkan realisasi pendapatannya

mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2019-2021 untuk realisasi belanja mengalami tren penurunan sedangkan realisasi pendapatannya juga mengalami tren penurunan.

- **Analisis Keserasian**

Analisis Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Analisis Keserasian ini, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

Rasio Belanja Operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{8.554.970.814.539}{3.251.896.483.590} \times 100\% \\ &= 2,63\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{9.375.598.176.840}{3.584.399.318.400} \times 100\% \\ &= 2,61\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{8.899.945.553.856}{3.527.528.304.319} \times 100\% \\ &= 2,52\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{8.287.005.336.991}{3.257.129.216.426} \times 100\% \\ &= 2,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{7.872.655.070.141}{3.094.272.755.604} \times 100\% \\ &= 2,54\% \end{aligned}$$

Rasio Belanja Modal dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{1.919.452.035.914}{3.251.896.483.590} \times 100\% \\ &= 5,90\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{1.564.903.232.653}{3.584.399.318.400} \times 100\% \\ &= 4,36\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.249.600.483.637}{3.527.528.304.319} \times 100\% \\ &= 3,54\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{1.497.944.969.133}{3.257.129.216.426} \times 100\% \\ &= 4,59\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{1.423.047.720.676}{3.094.272.755.604} \times 100\% \\ &= 4,59\% \end{aligned}$$

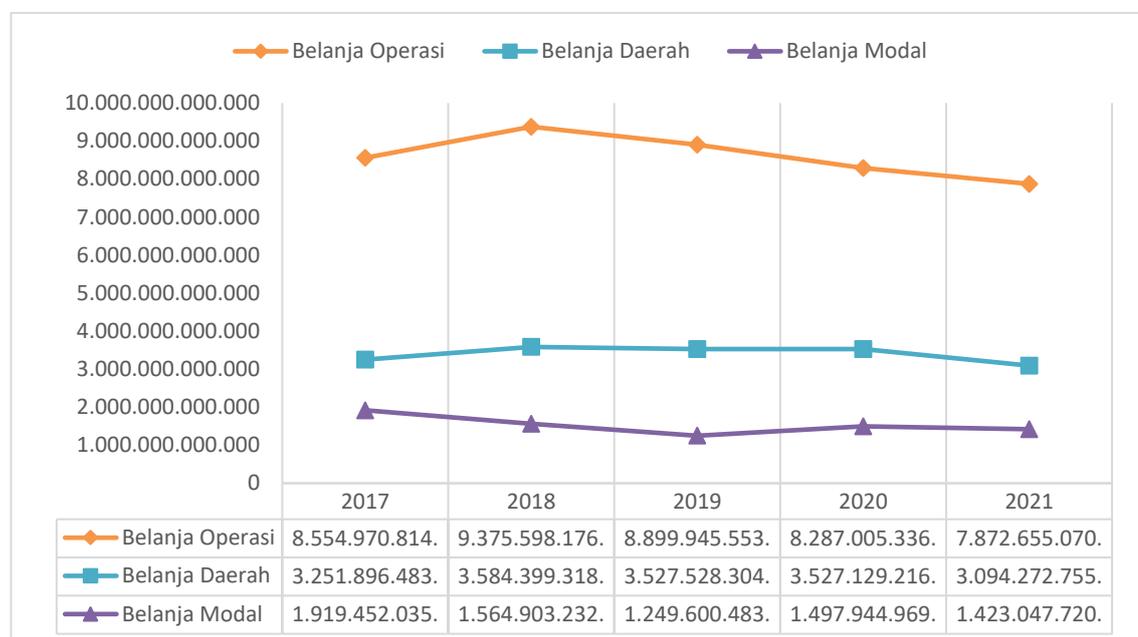
Tabel 4.4
Analisis Kecerassian Keuangan Daerah
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)
1	2017	2,63%	5,90%	-
2	2018	2,61%	4,36%	10%
3	2019	2,52%	3,54%	-1,6%
4	2020	2,54%	4,59%	8%
5	2021	2,54%	4,59%	5%

Sumber : Data diolah (2021)

Dapat dilihat dari tabel diatas Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) pada tahun 2017-2019 untuk rasio belanja operasi mengalami tren penurunan dan rasio belanja modal juga mengalami tren penurunan. Pada tahun 2019-2021 untuk rasio belanja operasi mengalami tren kenaikan dan rasio belanja modal mengalami tren kenaikan.

Perhitungan Analisis Keserasian dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4.4

Grafik Perkembangan Analisis Keserasian DPRD PROVSU Tahun 2017-2021

Berdasarkan pada gambar 4.4 terlihat grafik perkembangan analisis keserasian pada tahun 2017-2019 untuk belanja operasi mengalami tren kenaikan dan penurunan, untuk belanja daerah mengalami tren kenaikan dan penurunan, untuk belanja modal mengalami tren penurunan dan pada tahun 2019-2021 untuk belanja operasi mengalami tren penurunan, untuk belanja daerah mengalami tren penurunan dan juga untuk belanja modal mengalami tren kenaikan dan penurunan.

- **Analisis Pertumbuhan**

Analisis Pertumbuhan bermanfaat untuk mengukur perkembangan anggaran dari tahun ke tahun bersifat positif atau negatif. (Hanum, 2011) Analisis Pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing anggaran, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Pertumbuhan ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2007).

Analisis Pertumbuhan dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

$$\text{Tahun 2017} = \frac{12.234.837.881.539 - 0}{0}$$

$$= 0$$

$$\text{Tahun 2018} = \frac{12.703.058.587.891 - 12.234.837.881.539}{12.234.837.881.539}$$

$$= 0,38$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{13.081.482.296.509 - 12.703.058.587.891}{12.703.058.587.891}$$

$$= 0,29$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{12.427.408.181.012 - 13.081.482.296.509}{13.081.482.296.509} \\ &= (0,50) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{11.806.037.771.012 - 12.427.408.181.012}{12.427.408.181.012} \\ &= (0,50) \end{aligned}$$

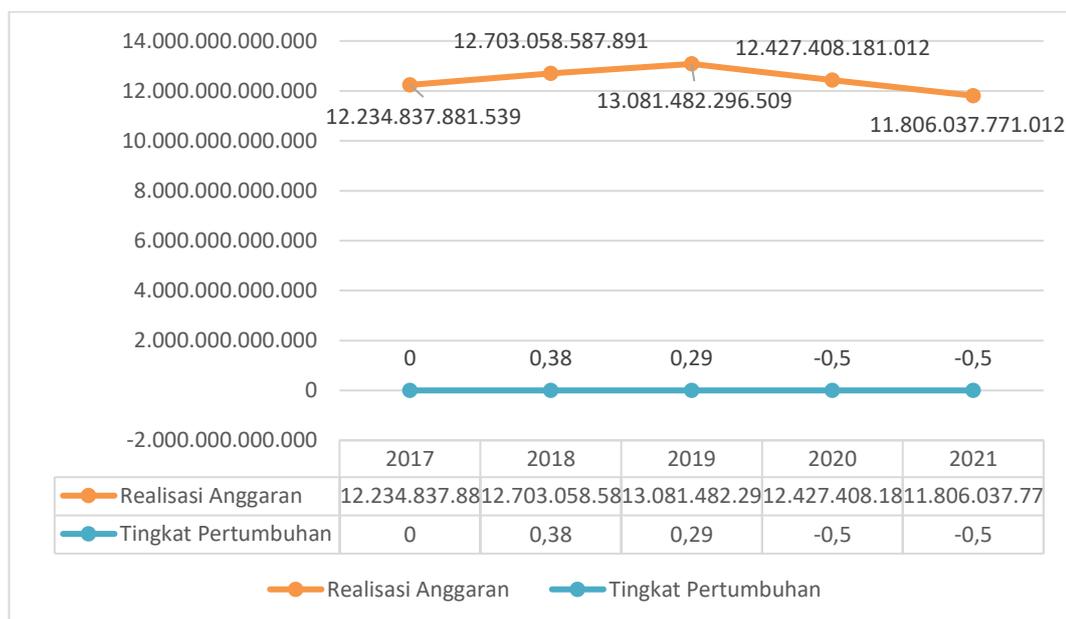
Tabel 4.5
Analisis Pertumbuhan Keuangan Daerah
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Tingkat Pertumbuhan	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)
1	2017	0	-
2	2018	0,38	3,8%
3	2019	0,29	3%
4	2020	(0,50)	-5%
5	2021	(0,50)	-5%

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat untuk tahun anggaran 2017-2019 tingkat pertumbuhan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 dan 2019 tingkat pertumbuhan bernilai positif yaitu 0,38 dan 0,29 sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 tingkat pertumbuhan bernilai negatif yaitu (0,50) disebabkan oleh realisasi anggaran mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini terjadi karena anggaran juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2017-2019 tingkat pertumbuhan mengalami tren kenaikan, sedangkan pada tahun 2019-2021 mengalami tren kenaikan dan tren penurunan.

Perhitungan Analisis Pertumbuhan dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4.5

Grafik Perkembangan Analisis Pertumbuhan DPRD PROVSU Tahun 2017-2021

Berdasarkan pada gambar 4.5 terlihat grafik perkembangan analisis pertumbuhan pada tahun 2017-2019 untuk realisasi anggarannya mengalami tren kenaikan dan juga pada tahun 2019-2021 untuk realisasi anggarannya mengalami tren penurunan.

- **Analisis Kemandirian**

Analisis Kemandirian ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Halim, 2007). Analisis Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan

daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Analisis Kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

Analisis Kemandirian dirumuskan sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{5.287.469.401.500}{6.928.134.939.913} \times 100\% \\ &= 76\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{5.638.960.579.478}{7.055.134.429.266} \times 100\% \\ &= 79\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{5.761.270.412.051}{7.300.647.588.241} \times 100\% \\ &= 78\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{5.531.237.378.774}{7.347.748.112.410} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{5.254.675.509.835}{6.980.360.706.789} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

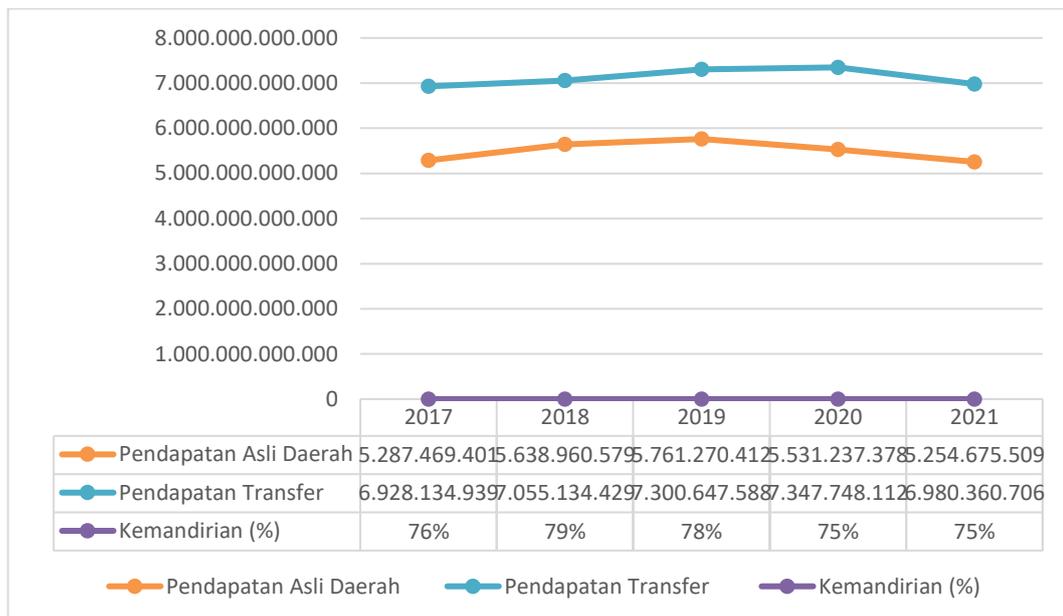
Tabel 4.6
Analisis Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Kemandirian (%)	Growth Ratio (Kenaikan/Penurunan)	Pola Hubungan	Kemampuan Keuangan
1	2017	76%	-	Delegatif	Tinggi
2	2018	79%	6,6%	Delegatif	Tinggi
3	2019	78%	2%	Delegatif	Tinggi
4	2020	75%	-4%	Partisipatif	Sedang
5	2021	75%	-5%	Partisipatif	Sedang

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017-2018 kemandirian mengalami tren kenaikan, pada tahun 2019-2021 kemandirian mengalami tren penurunan dengan pola hubungan delegatif dan partisipatif.

Perhitungan Analisis Kemandirian dapat dilihat pada Grafik berikut :



Gambar 4.6

Grafik Perkembangan Analisis Kemandirian DPRD PROVSU Tahun 2017-2021

Berdasarkan pada gambar 4.6 terlihat grafik perkembangan analisis kemandirian untuk tahun 2017-2019 pada Pendapatan Asli Daerah mengalami tren kenaikan dan pendapatan transfer mengalami tren kenaikan, sedangkan pada tahun 2019-2021 pada Pendapatan Asli Daerah mengalami tren penurunan dan pendapatan transfer juga mengalami tren kenaikan dan tren penurunan.

4.2 Pembahasan

1) Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Efektivitas PAD

Dilihat hasil dari analisis data untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 selisih anggaran dan realisasinya menunjukkan adanya pemanfaatan belanja sebesar Rp.182.587.563.275 dan Rp.334.480.890.663. Untuk tahun 2019 dan 2020 terjadi selisih anggaran yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.952.857.048.461 dan Rp.905.214.196.000 dan pada tahun anggaran 2021 terdapat selisih anggaran dan realisasinya sebesar Rp.859.953.487.000.

Pelaksanaan pemerintahan selama tahun anggaran 2021 terdampak oleh adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2019 akhir. Hampir semua sektor pada pemerintahan terdampak, termasuk pada pengelolaan keuangan yang terdiri atas banyak bagian. Salah satu bagian yang pengelolaan keuangan daerah yang terdampak adalah bagaimana realisasi dari pendapatan daerah di masa Pandemi Covid-19 pada tahun anggaran 2021.

Menurut (Suryani, 2018) semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka pemerintah pada umumnya telah memanfaatkan APBD khususnya belanja daerah dengan baik. Namun untuk tahun anggaran 2019 dan 2020 terjadi selisih anggaran dan realisasinya yang sangat signifikan yaitu sebesar

Rp.952.857.048.461 dan Rp.905.214.196.000. Pada tahun 2021 terjadi selisih anggaran dan realisasinya sebesar Rp.859.953.487.000.

Adapun hasil wawancara menyatakan penyebab anggaran belanja tidak terealisasikan secara signifikan yaitu karena adanya pengalihan anggaran dari belanja modal ke belanja barang dan jasa dan anggaran juga dialihkan ke hutang pemerintah. Adapun hasil wawancara dampak jika anggaran tidak terealisasikan secara signifikan tidak terlalu berdampak ke kegiatan pembangunan, namun sangat berdampak terhadap kinerja yang menurun pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU).

Dari Pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja anggaran pada tahun 2017 dan 2018 dilihat dari Analisis Efektivitas PAD Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) menurun karena belum mampu memanfaatkan anggaran yang direncanakan dengan baik. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Efektivitas PAD di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2021 sudah efektif dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 93% walaupun dikelola saat Pandemi Covid-19. Meskipun sudah dapat dikatakan efektif, masih terdapat faktor penghambat yang menyebabkan tidak tercapainya target dari PAD di Kantor Sekretariat DPRD PROVSU, yaitu berupa terganggunya operasional kegiatan masyarakat yang menghasilkan pajak disebabkan Pandemi Covid-19, berkurangnya aktivitas masyarakat yang menggunakan layanan pemerintah yang menggunakan tarif retribusi serta operasional/keuangan perusahaan daerah yang tidak optimal sehingga tidak memberikan keuntungan/laba yang optimal.

2) Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Efisiensi Keuangan Daerah

Dilihat dari hasil analisis data tahun 2017 rasio efisiensinya sebesar 16,17% dengan realisasi belanja sebesar Rp.8.554.970.814.539 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.5.287.469.401.500. Pada tahun 2018 rasio efisiensinya naik menjadi 16,62% dengan realisasi belanja sebesar Rp.9.375.598.176.840 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.5.638.960.579.478. Pada tahun 2019 rasio efisiensinya turun menjadi 15,44% dengan realisasi belanja sebesar Rp.8.899.945.553.856 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.5.761.270.412.051. Pada tahun 2020 rasio efisiensinya kembali menurun menjadi 14,98% dengan realisasi belanja sebesar Rp.8.287.005.336.991 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.5.531.237.378.774. Dan pada tahun 2021 rasio efisiensinya stabil yaitu 14,98% dengan realisasi belanja sebesar Rp.7.872.655.070.141 dan realisasi pendapatan sebesar Rp.5.254.675.509.835.

Pengelolaan keuangan saat Pandemi Covid-19 tergolong sangat efisien dengan persentase efisiensi kinerja keuangan kurang 60% dari total pendapatan daerah. Dalam konsep tingkat efisiensi keuangan dapat diukur dengan membandingkan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan daerah dengan biaya yang dikeluarkan. Semakin kecil nilai rasio yang diperoleh maka menunjukkan semakin tinggi tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah dalam mengelola pendapatan daerah. Sedangkan potensi pendapatan daerah menurun dalam membiayai belanja daerah yang bertambah fokus oleh penanganan kasus Covid-19. Dan potensi perekonomian menurun yang menyebabkan penurunan pada pendapatan daerah.

Menurut (Mahmudi, 2010) jika angka yang dihasilkan dari rasio kurang dari 100% maka tidak efisien dan dinilai telah melakukan efisiensi belanja. Hal ini menunjukkan rasio efisiensi belanja tidak ada yang melebihi dari 100%, hal ini juga membuktikan bahwa Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) telah melakukan penghematan atas anggaran yang telah digunakan.

Hal ini didukung dari hasil wawancara yaitu realisasi tidak pernah melebihi anggaran setiap tahunnya. Karena realisasi harus sesuai dengan budget anggaran yang disesuaikan. Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa kinerja anggaran dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah kinerjanya sudah baik.

3) Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Keserasian

Dilihat dari hasil analisis data proporsi tahun 2017 rasio belanja operasi sebesar 2,63% dan rasio belanja modal sebesar 5,90%. Pada tahun 2018 rasio belanja operasi nya menurun menjadi 2,61% dan rasio belanja modal nya menurun menjadi 4,36%. Pada tahun 2019 rasio belanja operasi nya kembali menurun menjadi 2,52% dan rasio belanja modal nya juga kembali menurun menjadi 3,54%. Pada tahun 2020 rasio belanja operasi nya kembali naik menjadi 2,54% dan rasio belanja modal nya kembali naik menjadi 4,59%. Pada tahun 2021 rasio belanja operasi nya stabil yaitu sebesar 2,54% dan rasio belanja modal nya yaitu 4,59%. Menurut (Mahmudi, 2010) pada umum nya proporsi belanja modal dengan belanja adalah antara 5%-20%.

Tahun 2017 rasio belanja operasi sebesar 2,63%, proporsinya tidak berada diantara 5%-20% dan rasio belanja modal sebesar 5,90%, proporsinya berada diantara 5%-20%. Tahun 2018 rasio belanja operasi menurun menjadi 2,61%,

proporsinya tidak berada diantara 5%-20% dan rasio belanja modal menurun sebesar 4,36%, proporsinya tidak berada diantara 5%-20%. Pada tahun 2019 rasio belanja operasi kembali menurun menjadi 2,52%, proporsinya tidak berada diantara 5%-20% dan rasio belanja modal menurun sebesar 3,54% namun proporsinya tidak berada diantara 5%-20%. Pada tahun 2020 rasio belanja operasi kembali naik menjadi 2,54%, proporsinya tidak berada diantara 5%-20% dan rasio belanja modal sebesar 4,59% namun proporsinya tidak berada diantara 5%-20%. Dan pada tahun 2021 rasio belanja operasi stabil sebesar 2,54%, proporsinya tidak berada diantara 5%-20% dan rasio belanja modal sebesar 4,59%, proporsinya juga tidak berada diantara 5%-20%.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk anggaran belanja modal pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU). Analisis ini dilakukan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan, dinilai apakah sudah mampu dalam menjalankan kegiatan pembangunannya atau sebaliknya.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal terhadap APBD yang ideal (Nafarin, 2012), karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun menurut (Mahmudi, 2010) pada umumnya proporsi belanja modal dan belanja operasi adalah antara 5%-20%.

Dari hasil wawancara menyatakan kriteria penilaian porsi belanja terhadap belanja daerah di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (DPRD PROVSU) berdasarkan atas realisasi. Adapun porsi belanja terhadap belanja daerah tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan disebabkan oleh sesuainya kebutuhan yang diinginkan bukan sesuai kebutuhan yang dianggarkan.

Dari hasil pembahasan diatas pada tahun 2017-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) dalam pembelajaran modal mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunan. Sedangkan untuk tahun 2019-2020 dan 2021 pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) dianggap belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan kegiatan pembangunannya.

4) Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Pertumbuhan

Dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan anggaran, pertumbuhannya mengalami fluktuasi, pada tahun 2017 realisasi anggaran sebesar Rp.12.234.837.881.539 dengan tingkat pertumbuhan 0, pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar Rp.12.703.058.587.891 dengan tingkat pertumbuhan naik sebesar 0,38. Pada tahun 2019 realisasi anggaran sebesar Rp.13.081.482.296.509 dan tingkat pertumbuhan turun menjadi 0,29. Pada tahun 2020-2021 realisasi anggaran sebesar Rp.12.427.408.181.012 dan Rp.11.806.037.771.012 dengan tingkat pertumbuhan sama yaitu negatif sebesar (0,50), pertumbuhan mengalami naik turun dikarenakan mengetahui pertumbuhan kinerja pendapatan selama 5 tahun.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan kinerja pendapatan selama beberapa tahun anggaran (Mahmudi, 2019). Tren pendapatan dapat dikatakan baik apabila dapat naik terus setiap tahun

nya, jika mengalami penurunan maka penyebabnya harus ditemukan dan dicari solusinya (Halim & S.K, 2013).

Analisis Pertumbuhan Belanja menurut (Mahmudi, 2019) dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan belanja. Belanja tersebut harus dapat dikatakan rasional apabila pertanggungjawabannya telah dilakukan. (Mahmudi, 2019) menambahkan bahwa belanja cenderung akan selalu naik karena disesuaikan berdasarkan tingkat inflasi, perubahan kurs, pelayanan dan faktor ekonomi.

Menurut (Mahmudi, 2010) analisis pertumbuhan anggaran bermanfaat untuk mengetahui perkembangan anggaran dari tahun ke tahun. Pada umumnya anggaran memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan anggaran biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi.

Dapat dilihat dari tahun 2018 yaitu 0,38 dan pada tahun 2019 yaitu 0,29. Namun pada tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan keuangan daerah nya bernilai negatif yaitu (0,50), hal ini disebabkan oleh realisasi anggaran mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini terjadi karena anggaran juga mengalami penurunan signifikan dari tahun sebelumnya.

Adapun dari hasil wawancara penyebab menurunnya anggaran karena minimnya realisasi dan adapun hasil dari wawancara dampak menurunnya anggaran yaitu berkurangnya porsi anggaran daerah otomatis mengurangi pekerjaan pegawai terhadap realisasi anggaran.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat dari hasil analisis data pertumbuhan anggaran Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) cenderung bernilai positif kecuali pada tahun 2020 dan

2021 bernilai negatif yang disebabkan menurunnya anggaran dari tahun sebelumnya dan dilihat dari hasil wawancara penyebab dan dampak dari menurunnya anggaran tidak ada menyatakan kinerja yang kurang baik. Jadi, kinerja anggaran dilihat dari pertumbuhan belanja kinerjanya sudah baik.

5) Kinerja Keuangan Dilihat Dari Analisis Kemandirian Keuangan Daerah

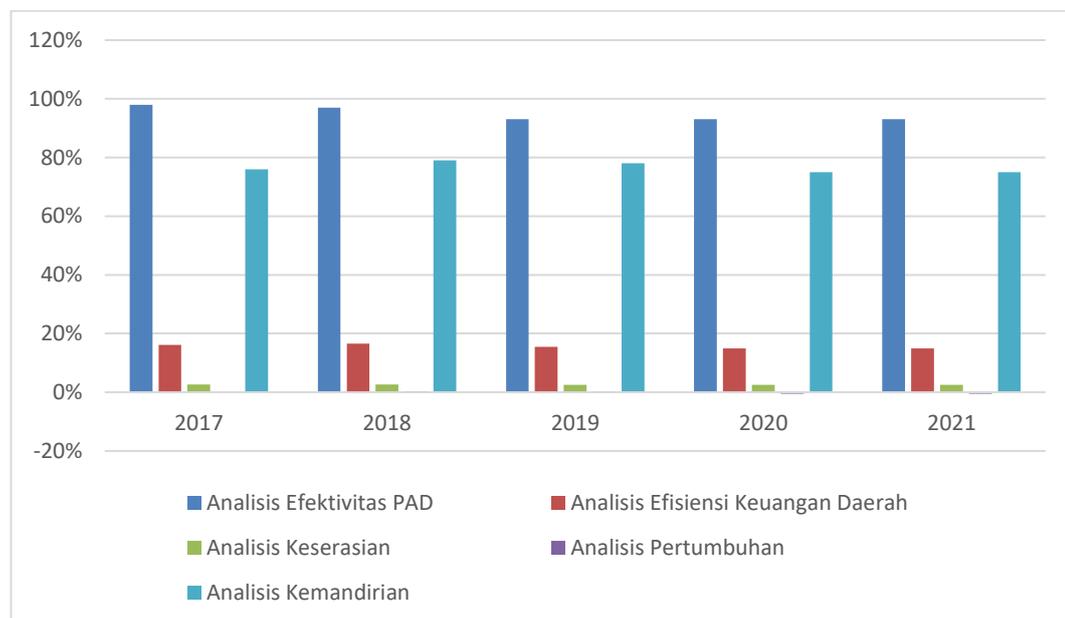
Dilihat dari hasil analisis data berawal pada tahun 2017 rasio kemandirian sebesar 76% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.287.469.401.500 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.6.928.134.939.913 kemudian pada tahun 2018 rasio kemandirian naik menjadi 79% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.638.960.579.478 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.7.055.134.429.266. Pada tahun 2019 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 78% dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.761.270.412.051 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.7.300.647.588.241 serta pada tahun 2020 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.531.237.378.774 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.7.347.748.112.410 dan 2021 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.254.675.509.835 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp.6.980.360.706.789 serta rasio kemandirian pun mengalami penurunan menjadi 75%. Pola kemandirian keuangan pada data diatas tergolong delegatif dan partisipatif karena tergolong dalam interval 50%- 75% dan 75% - 100% yaitu partisipatif merupakan peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah serta delegatif yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) sangat mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara mampu mengelola pendapatan dan belanja sekaligus dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sosial dengan baik, dengan kata lain kinerja keuangan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat baik.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi. Kinerja keuangan Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) tahun 2017-2019 dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah sudah sesuai dengan tujuan yang tercantum di dalam Undang-Undang. Menurut (Halim, 2008) “Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.”

Analisis kemandirian digunakan untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam mendanai daerahnya melalui PAD (Kawatu, 2019). Perhitungan rasio kemandirian menurut (Kawatu, 2019) dilakukan dengan membandingkan PAD dengan total antara transfer pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pinjaman dari Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya. PAD yang semakin besar dibandingkan total transfer akan mencerminkan kemandirian daerah tersebut yang artinya daerah tersebut mampu membiayai otonomi daerahnya.

Adapun dari hasil wawancara dengan tinggi nya rasio kemandirian yang dicapai Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) sudah pasti kinerja keuangan pada tahun 2017-2019 sudah baik dan telah dibuktikan dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah, juga telah sesuai dengan beberapa definisi kemandirian yang telah disebutkan.



Gambar 4.7

Grafik Perkembangan Analisis Rasio Keuangan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021

Dapat dilihat pada grafik perkembangan Analisis Rasio Keuangan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara selama 5 tahun terakhir untuk kinerja keuangan pada Analisis Efektivitas PAD tidak terealisasi secara signifikan dikarenakan kinerja anggaran pada tahun 2017-2018 menurun karena belum mampu memanfaatkan anggaran yang direncanakan dengan baik. Untuk Analisis Efisiensi Keuangan Daerah realisasi tidak pernah melebihi anggaran setiap tahunnya. Karena

realisasi harus sesuai dengan budget anggaran yang disesuaikan. Dan kinerja anggaran dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah kinerjanya sudah baik. Untuk Analisis Keserasian porsi belanja terhadap belanja daerah tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan disebabkan oleh sesuainya kebutuhan yang diinginkan bukan sesuai kebutuhan yang dianggarkan. Untuk Analisis Pertumbuhan yaitu pertumbuhan anggaran nya mengalami fluktuasi dan untuk Analisis Kemandirian, Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD PROVSU) sangat mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan dilihat dari Analisis Efektivitas PAD, Analisis Efisiensi Keuangan Daerah, Analisis Keserasian, Analisis Pertumbuhan dan Analisis Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Efektivitas PAD memiliki kinerja yang menurun, disebabkan anggaran yang sudah direncanakan dialihkan ke belanja barang dan jasa dan dialihkan ke hutang pemerintah sehingga Kantor Sekretariat DPRD PROVSU belum mampu memanfaatkan anggarannya dengan baik.
2. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Efisiensi Keuangan Daerah memiliki realisasi anggaran tidak ada yang melebihi anggaran belanja, hal ini menunjukkan bahwa Kantor Sekretariat DPRD PROVSU telah melakukan penghematan atas anggaran dan hal ini juga didukung dari hasil wawancara bahwa realisasi anggaran harus sesuai dengan budget anggaran yang telah disediakan. Maka kinerja anggaran dari Rasio Efisiensi dikatakan sudah baik.
3. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Keserasian bahwa proporsi rasio belanja operasi dan rasio belanja modal pada kinerja keuangan Kantor Sekretariat DPRD PROVSU dikatakan belum mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunannya dikarenakan proporsi yang belum mampu mencapai seperti proporsi pada umumnya.

4. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Pertumbuhan mengalami fluktuasi dan dimana pertumbuhannya bernilai negatif disebabkan karena menurunnya anggaran karena minimnya realisasi, namun pertumbuhan belanja cenderung bernilai positif. Jadi, kinerja keuangan anggaran dilihat dari Analisis Pertumbuhan kerjanya sudah baik.
5. Kinerja Keuangan dilihat dari Analisis Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan mengalami pola hubungan delegatif dan partisipatif pada Kantor Sekretariat DPRD PROVSU dan mampu mengelola keuangannya dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang potensial dari PAD

5.2 Saran

- a) Untuk kinerja anggaran Kantor Sekretariat DPRD PROVSU agar meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan kualitas kinerja SDM bagian keuangan, penganggaran dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian internal dari masing-masing unsur dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisiensi.
- b) Kantor Sekretariat DPRD PROVSU harus mempertahankan kinerja belanja yang sudah baik karena realisasinya tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dengan memperhatikan anggaran dan realisasinya.
- c) Kantor Sekretariat DPRD PROVSU harus memperhatikan kinerja dalam pengelolaan anggaran dari APBD yang diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri, & Asmar, J. A. (2006). *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah*. Simposium Akuntansi Nasional.
- Alfi, M. F. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan, Vol. 2 No. 3*.
- Bastian. (2006a). *Kinerja Keuangan*.
- Bastian, I. (2006b). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi 3*. Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Halim, A. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Halim, A., & S.K. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2011). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Berdagai. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU Jilid 11*.
- Juliandi, A., & dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. UMSU Press.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP STIM YKPN.
- Junita, & dkk. (2016). *Penganggaran Perusahaan*. Cita Pustaka Media.
- Kawatu. (2019). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. 7 No. 3*.
- Mahmudi. (2010a). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010b). *Rasio Efektivitas PAD*.
- Mahmudi. (2010c). *Rasio Pertumbuhan*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cetakan 2*. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. (2006a). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.

- Mahsun. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFÉ.
- Mahsun, M. (2006b). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFÉ.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.
- Mariani, D. (2006). *Anggaran sebagai Alat Pengendalian*.
- Mulyadi. (2001). *Akuntansi Manajemen, Konsep, Manfaat dan Rekayasa Edisi Ketiga*. Salemba Empat.
- Mulyadi. (2007). *Anggaran Perusahaan*. BPFÉ.
- Munawir. (2002). *Analisis Informasi Keuangan Edisi Pertama*. Liberty Yogya.
- Munawir, S. (2004). *Analisis Laporan Keuangan*. Liberty.
- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*. Salemba Empat.
- Niaman, M. (2017). *Fungsi dan Manfaat Anggaran (Lengkap)*.
<https://www.akuntansilengkap.com>.
- Nordiawan. (2016). Pengembangan Indikator Keberhasilan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, Vol. 1 No. 1*.
- Pelaporan Keuangan, Akuntansi dan Audit di Pemerintahan*. (2009).
- Peraturan Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007. (2011). *Tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah No. 55*. (2005).
- PPAS Perubahan APBD*. (2019).
- Prasetya, G. E. (2005). *Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. ANDI.
- Radita, A. H. (2017). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012-2016 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi*. Skripsi yang dipublikasikan.
- Rahayu, S., & Rachman, A. A. (2013). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Graha Ilmu.
- Rahmayati, I. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat.
- Rudianto. (2013). *Akuntansi Manajemen*. Graha Ilmu.
- Sari, E. N., & dkk. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Perdana Publishing.

- Sari, M. (2021). *Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance*. UMSU Press.
- Sawir, A. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sinambela, E., & F.S. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Srimindarti, C. (2006). *Balanced Scorecard sebagai Alternatif untuk mengukur kinerja*. STIE Stikubank.
- Sudaryono. (2017). *Rasio Efektivitas PAD*.
- Sujarweni, W. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Pustaka Baru Press.
- Suryani, F. (2018). *Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Media Intan Semesta Jakarta*. XVI(1), 77–83.
- Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (2004). Undang-Undang No. 133 Tahun 2004.
- UMSU, F. (2021). *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. UMSU.
- Welsch, & dkk. (2012). *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba. Buku 1*. Salemba Empat.
- Widyaningsih, K. (2006). *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)*. Skripsi yang dipublikasikan.
- Wild, & Halsey. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*. Salemba Empat.

Lampiran :

Transkrip Wawancara

Objek Wawancara	Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Tempat Wawancara	Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Nama Mahasiswa	Fadila Nurhaliza
Nama Pegawai	Hasanuddin Ambarita
Jabatan Pegawai	Bendahara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Waktu Wawancara	17 Juni 2022

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
1	Apa sajakah bagian Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara?	Bagian dari Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung
2	Informasi apa saja yang disajikan dalam Laporan	Yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
	Realisasi Anggaran?	yaitu realisasi belanja langsung dan realisasi belanja tidak langsung
3	Apakah penyebab anggaran tidak terealisasi secara signifikan?	Terjadinya anggaran yang tidak terealisasi secara signifikan dikarenakan adanya pengalihan anggaran ke belanja barang dan jasa lalu dialihkan ke hutang pemerintah
4	Bagaimanakah dampaknya jika anggaran tidak terealisasi secara signifikan?	Tidak terlalu berdampak ke anggaran tetapi sangat berdampak terhadap kinerja yang menurun
5	Apakah penyebab menurunnya anggaran?	Karena minimnya realisasi
6	Apakah penyebab meningkatnya anggaran?	Karena kebutuhan untuk pengelolaan perlengkapan, peralatan dan lain sebagainya
7	Apakah dampak menurunnya anggaran?	Berkurangnya porsi belanja modal, otomatis akan mengurangi pekerjaan pegawai terhadap realisasi anggaran
8	Apakah sistem informasi	Sistem informasi keuangan

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
	<p>keuangan daerah yang digunakan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara?</p>	<p>daerah yang digunakan di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara itu ada dua, yang pertama untuk penganggarannya menggunakan namanya aplikasi SIPD Kemendagri RI, yaitu merupakan produk yang diciptakan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia yang digunakan seluruh instansi di Provinsi Sumatera Utara, yang kedua adalah aplikasi Simda Provinsi Sumatera Utara</p>
9	<p>Apakah Sub bagian keuangan/akuntansi di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan sistem informasi dalam proses akuntansi?</p>	<p>Pasti sudah. Sudah sesuai akuntansi, karena memang aplikasi ini berujung pada proses akuntansi yang sebenarnya dan sebaiknya</p>

No	Pertanyaan	Jawaban Responden
10	Apakah Inspektorat DPRD Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian APBD dengan realisasinya?	Ya, sudah. Untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengawasan terhadap kesesuaian APBD juga dengan realisasinya
11	Bagaimana perlakuan DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam menilai dan mengawasi kesesuaian pengelolaan keuangan daerah?	Kalau di DPRD Provinsi Sumatera Utara kan sejatinya mereka hanya pelaksana daripada kegiatan, jadi mereka tetap selalu menilai dan mengawasi kesesuaian pengelolaan keuangan daerah, baik dibagian bidang anggaran dan realisasinya

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Tempat dan Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 17 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 dari 2 bersaudara
Alamat : Jalan Gunung Sibayak No. 7 Medan Timur
No Telephone : 082163340180
Email : fadilanurhalizaa17@gmail.com

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Ali Yusyak
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Nurbaini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Sei Bahilang Kota Tebing Tinggi
No Telephone : 085270090336

DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. SDS Muhammadiyah At-Taqwa Kota Tebing Tinggi 2006 - 2012
2. SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi 2012 - 2015
3. SMA Negeri 1 Tebing Tinggi 2015 - 2018
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Akuntansi (Konsentrasi Akuntansi Sektor Publik) 2018 –
Sekarang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2342/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/11/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 15/11/2021

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FADILA NURHALIZA
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Terjadinya Keterlambatan pelaporan realisasi anggaran Alokasi Dana

Rencana Judul : 1. ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
2. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
3. ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN PRINSIP VALUE FOR MONEY

Objek/Lokasi Penelitian : DPRD Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(FADILA NURHALIZA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2342/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/15/11/2021

Nama Mahasiswa : FADILA NURHALIZA
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul : 15/11/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Dr. Eka Nurmalia Sari, SE., M.Si., Ak., CA (25 Januari 2022)

Judul Disetujui**)

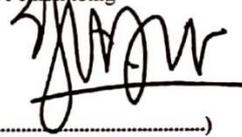
Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
untuk melihat kinerja keuangan pada
kantor Sekretariat DPRD Provinsi
Sumatera Utara

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi


(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si.)

Medan, Pebruari 2022

Dosen Pembimbing


(.....)

Keterangan:

*) Dasi oleh Pimpinan Program Studi

***) Dasi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : F A D I L A N U R H A L I Z A

NPM : 1 8 0 5 1 7 0 3 3 8

Tempat.Tgl. Lahir : T E B I N G T I N G G I
1 7 J U N I 2 0 0 1

Program Studi : Akuntansi /
Manajemen

Alamat Mahasiswa : J A L A N G U N U N G S I B A Y A K
N O - 7

Tempat Penelitian : D P R D P R O V I N S I
S U M A T E R A U T A R A

Alamat Penelitian : J I . I M A M B O N J O L N O . 5
M E D A N P E T I S A H

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:

1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Dr. Zuhra Nurum, SE, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Fadria Nurhaliza.....)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menyalin surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 290/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 11 Rajab 1443 H
12 Februari 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Jln. Imam Bonjol No. 5 Medan Petisah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fadila Nurhaliza
Npm : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4538333 Fax. (061) 4522270
Medan Kode Pos 20112
Email : Humas.dprdsulut@gmail.com

Medan, 25 Februari 2022

Nomor : 431.A /18/Sekr
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset Pendahuluan

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-

Medan.

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 290/II.3-AU/UMSU-05/F/2022 tanggal 12 Februari 2022 Perihal Izin Riset Pendahuluan, dengan ini memberikan Izin kepada Mahasiswa/i yang tersebut di bawah ini :

Nama : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)

Untuk Melaksanakan Riset dalam rangka pengumpulan data untuk Penyusunan Skripsi dengan judul “ *Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara* ” di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi peraturan yang berlaku di Sekretariat DPRD-SU
2. Mengenakan pakaian yang sopan serta selalu menjaga ketertiban dilingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara
3. Melapor Kepada Kepala Bagian Umum Cq. Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian apabila telah selesai melaksanakan Riset.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBBAG TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



NIP. 19640312 198509 2 001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengutip surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 291/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Fadila Nurhaliza
N P M : 1805170338
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal / Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 12 Februari 2023**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Rajab 1443 H
12 Februari 2022 M



Dekan

Dr. Fauzi, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 5 Telp. (061) 4575001 - 4538333 Fax. (061) 4522270
Medan Kode Pos 20112
Email : Humas.dprdsulut@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 571 /18/Sekr

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa/i tersebut di bawah ini dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yaitu :

Nama : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Telah selesai melaksanakan Riset di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara Jl. Imam Bonjol No. 5 Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 25 Maret 2022

a.n. SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
KASUBAN YUSUF M. S. PENATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN



SETWAN H. HANI
PENATA TK.I

NIP. 19640312.198509.2.001



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Eksistensi kami adalah bukti dari kepercayaan masyarakat yang terdapatnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://feb.umsu.ac.id>

feb@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

Nomor : 1995/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 14 Dzulhijjah 1443 H
13 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara
Jln. Imam Bonjol No. 5 Medan Petisah
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fadila Nurhaliza
N P M : 1805170338
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :
1. Peringgal

Dekan

H. Jamri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

II. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fadila Nurhaliza
Program Studi : Akuntansi
NPM : 1805170338
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki LBM tambah data kinerja. identifikasi masalah harus ada data.	15/3/22	
Bab 2	Perbaiki teori, harus yang relevan. korangkan konsep keul.	15/3/22	
Bab 3	perbaiki bab 3.	15/3/22	
Daftar Pustaka	Intasi dosen sblt umsu.	15/3/22	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si.)

Medan, 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

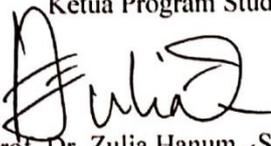
Il. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fadila Nurhaliza
Program Studi : Akuntansi
NPM : 1805170338
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	perbaiki LRM, data harus lengkap	19/3/22	ZH
Bab 2	Tambah teori di bab II yang relevan	19/3/22	ZH
Bab 3	perhatikan definisi operasional variabel	19/3/22	ZH
Daftar Pustaka	Sitasi achbel dosen unu.	19/3/22	ZH
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	ditutur lebih = wawancara	19/3/22	ZH
Persetujuan Seminar Proposal	_____		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Fadila Nurhaliza
Program Studi : Akuntansi
NPM : 1805170338
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Nama Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA
Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—	—	
Bab 2	teori yg penguluan konsep keuangan di bab 2 belu ada, tambah.	24/3/22	3/1
Bab 3	perbaiki dengan opsional variabel analisis data perbaiki.	24/3/22	2/1
Daftar Pustaka	lihat lagi sitasi dosen	24/3/22	3/1
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		—
Persetujuan Seminar Proposal	acc draft proposal lanjut ke seminar proposal	24/3/22	3/1

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum., S.E., M.Si.)

Medan, 24-3-2022

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 31 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Fadila Nurhaliza*
NPM. : 1805170338
Tempat / Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 17 Juni 2001
Alamat Rumah : Jln. Gunung Sibayak No. 7
Judul Proposal : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	<i>Judul disempurnakan</i>
Bab I	<i>latar belakang disesuaikan</i>
Bab II	<i>keni ditambahkan</i>
Bab III	<i>waktu penelitian</i>
Lainnya	<i>Systematika penulisan, Daftar Pustaka</i>
Kesimpulan	<i>Perbaikan Minor</i> Seminar Ulang <i>Perbaikan Mayor</i>

Medan, 31 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanam, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pemanding

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 31 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Fadila Nurhaliza
NPM : 1805170338
Tempat / Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 17 Juni 2001
Alamat Rumah : Jln. Gunung Sibayak No. 7
Judul Proposal : Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : ...*Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, Ak, CA* *AS 20/5 - 2022*

Medan, 31 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si., Ak., CA

Pemanding

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si